

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kekuatan hukum pembuktian atas keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana dan pengaturan hukum atas keterangan saksi yang tidak disumpah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini antara lain: 1) bagaimana kekuatan hukum atas keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana, 2) bagaimana pengaturan hukum atas keterangan saksi yang tidak disumpah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Temuan skripsi ini menunjukkan bahwa: 1) keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan bukan merupakan alat bukti dalam proses peradilan pidana di Indonesia, 2) pengaturan hukum keterangan saksi yang tidak disumpah dalam persidangan perkara pidana hanya boleh dijadikan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP. Dari kesimpulan tersebut disarankan: 1) perlindungan terhadap alat bukti keterangan saksi yang tidak disumpah harus dilaksanakan dengan sepenuhnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara pidana, 2) Hakim dalam memeriksa kasus yang memerlukan keterangan saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian harus lebih memperhatikan keterangan saksi yang tidak disumpah dan tidak boleh mengesampingkan begitu saja.

Kata kunci: *Kekuatan Alat Bukti, Keterangan Saksi, Pembuktian Perkara Pidana*

ABSTRACT

The purpose of this thesis research is to find out and analyze the legal force of evidence on the statements of witnesses who are not sworn in in proving criminal cases and the legal arrangements for the statements of witnesses who are not sworn in in Indonesian laws and regulations. The formulation of the problem in this writing includes: 1) what is the legal force for the testimony of witnesses who are not sworn in in proving criminal cases, 2) how are the legal arrangements for the testimony of witnesses who are not sworn in in Indonesian laws and regulations. In writing this thesis, the authors apply normative legal research methods. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Analysis of legal materials is carried out by identifying, classifying, interpreting, and evaluating legal materials related to the issues discussed. The findings of this thesis show that: 1) the testimony of a witness who is not sworn in in proving a criminal case in court is not evidence in the criminal justice process in Indonesia, 2) legal arrangements for witness testimony that is not sworn in in a criminal trial may only be used as additional evidence other legal matters where this is regulated in Article 185 paragraph (7) of the Criminal Procedure Code. From these conclusions it is suggested: 1) protection of witnesses who are not sworn in must be fully implemented in accordance with applicable laws and regulations with the aim of providing protection for witnesses who are not sworn in in proving criminal cases, 2) Judges in examining cases that require The testimony of a witness who is not sworn in in evidence must pay more attention to the statement of a witness who is not sworn in and may not simply rule it out.

Keywords: *The Power of Evidence, Witness Statement, Proof of Criminal Cases.*